

# PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT DI KOTA JAYAPURA

Muslim, SH.,MHum<sup>1</sup>

**Abstrak :** Bahwa peranan balai pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana bersyarat. Di lakukan melalui tiga tahap yaitu: bimbingan tahap awal yang terdiri dari. Penelitian Kemasyarakatan, Menyusun rencana program bimbingan, Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan, bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari. Pelaksanaan program bimbingan, Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. Bimbingan tahap akhir yang terdiri dari, Pelaksanaan program bimbingan, Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, Mempersiapkan Klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan Klien, Mengakhiri masa bimbingan Klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Peranan, Balai Pemasyarakatan, Pembinaan, Terpidana, Bersyarat

## PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukumataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus di dasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa apabila tindakan tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat di kategorikan sebagai penyimpangan hukum.

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas.

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan<sup>2</sup>. Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.

Umumnya pembedaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah di laksanakan sejak

---

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.29

tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang system pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha- usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatananpembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Dewasa ini masalah Pembinaan semakin menjadi kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini menurut Muladi di perlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak dari pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Bertitik tolak dengan pidana bersyarat, maka dasar hukum pidana bersyarat merupakan ruang lingkup dari Pasal 10 KUHP. Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya. Sejalan dengan ide pemasyarakatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Saharjo, maka pendayagunaan lembaga pidana bersyarat mempunyai peranan dalam usaha menunjang system pemasyarakatan. Hal ini karena pembinaan terpidana baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan adalah juga masih termasuk proses pidana. Tujuan dijatuhkan pidana bersyarat atau percobaan tidak

lain adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap diri terpidana, disamping itu agar terpidana tidak terlepas hubungan dengan masyarakat baik masyarakat lingkungannya maupun dengan keluarganya.

Dalam pemberantasan kejahatan yang penting bukan hanya pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan terhadap pelanggar hukum, tetapi terutama perlakuan sesudahnya yang akan menentukan apakah si pelanggar hukum menjadi baik atau tidak agar putusan pidana atau tindakan itu ada manfaatnya. Berdasarkan pengalaman bahwa kehidupan dalam lembaga kurang baik bila dibandingkan dengan kehidupan dalam masyarakat bebas yang disertai pengawasan dan bimbingan (pembinaan di luar lembaga).

Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan selama ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut dengan BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembinaan pidana bersyarat oleh petugas Balai Pemasyarakatan selama ini dirasakan masih kurang baik, yang mana faktor-faktor seperti terlambatnya pengiriman vonis oleh hakim ke Bapas, tidak jelasnya alamat yang bersangkutan maupun kurangnya biaya operasional sebagai penyebabnya. Akibat kurang baiknya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan petugas BAPAS, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, serta penulis ingin mengetahui sistem pengawasan dan pembinaan balai pemasyarakatan (BAPAS) terhadap peran penting dalam memberikan Pembinaan terhadap terpidana bersyarat

yaitu dengan membrikan pengawasan yang khusus, maka dalam kajian ini berfokus pada Peranan Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Kota Jayapura.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pengertian Peranan

Peranan berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peranan yang di jelaskan dalam status, Kedudukan dan Peranan dalam masyarakat, dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula di pinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi.

**Rony Hanitijo Soemitro** menyatakan mengenai peranan sebagai keseluruhan kewajiban-kewajiban yang menntukan kedudukan sosial seseorang secara kolektif di sebut peranan (role), dan keseluruhan hak-hak di namakan dengan kedudukan (status), kewajiban merupakan peranan atau peranan imperatif karena harus di dilaksanakan (bersifat aktif), sedangkan hak-hak adalah peranan yang fakultatis sifatya karena boleh

tidak di lakukan (statis)<sup>3</sup>.

Menurut **Soejono Soekamto** : dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di jelaskan bahwa, peranan tentu dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (ideal role)
  2. Peranan yang seharusnya (expected role)
  3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (perceive role)
  4. Peranan yang sebenarnya di lakukan (actual role)<sup>4</sup>.
- Peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak lain,

sedangkan peranan yang di anggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya di lakukan berasal dari diri sendiri Menurut **Biddle dan Thomas**: Peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan . Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa m emberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.

### **Pengertian Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pidanaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, tetapi ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pada Pasal 10 KUHP, khususnya pada pidana penjara dan kurungan yang keberlakuannya hanya pada batas satu tahun penjara atau kurungan.

---

<sup>3</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, 1985, h.42

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cv, Rajawali, 1983, Jakarta, h.11

Menurut **P.A.F. Lamintang** kata-kata pidana bersyarat atau putusan percobaan adalah Sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pembedaan yang bersyarat melainkan pidana itu yang di gantungkan pada syarat-syarat tertentu<sup>5</sup>. Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya di gantungkan pada syarat-syarat tertentu<sup>6</sup>. Artinya, pidana yang di jatuhkan oleh hakim itu di tetapkan tidak perlu di jalankan pada terpidana selama syarat- syarat yang di tentukan tidak di langgarnya, dan pidana dapat di jalankan apabila syarat- syarat yang di tetapkan itu tidak di taatinya atau di langgarnya.

**Andi Hamzah** berpendapat mengenai pidana bersyarat atau putusan percobaan menyatakan bahwa Pembedaan bersyarat dapat disebut pula pembedaan dengan perjanjian atau pembedaan secara janggalan<sup>7</sup>. Artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah di jalani kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang di berikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada, akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak di lakukan.

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 136.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Andi Hamsah, *Sistim pidana dan pembedaan indonesia*, PT.Prandnya paramita, Jakarta 1993, h, 45



Sementara itu **Muladi** menyatakan bahwa Pidana bersyarat atau putusan percobaan adalah suatu pidana di mana siterpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah di tentukan oleh pengadilan (pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana)<sup>8</sup>.

Pidana bersyarat atau putusan percobaan tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaan nya di lakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak di asingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu di jalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar.

Meunurut **R.Soesilo** menyatakan Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan”artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah di jalankan, kecuali jika kemudian ternyata, si terhukum sebelum habis tempo percobaan ia berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang di adakan oleh hakim

---

<sup>8</sup> Muladi ,*Lembaga Pidana Bersyarat*, h. 195-196.

kepadanya, maka keputusan penjatuhan hukuman terhadapnya tetapada<sup>9</sup>.

### **Dasar Hukum Pidana Bersyarat**

Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya di terapkan adanya pidana bersyarat pada tahun 1926 yang di tuangkan dalam STB. 1926 NO. 251 JO 486, akan tetapi baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan ke dalam KUHP berupa ketentuan Pasal 14a sampai 14f.

Dalam Pasal 14a KUHP menentukan :

1. Jika di jatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan di jatuhkan hukuman kurungan di antaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak di jalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan di tentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh di hukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya di adakan dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin di perintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan

---

<sup>9</sup> R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1991, h. 53

pelanggaran candu hanya di anggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal di jatuhi pidana denda, tidak di terapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak di berikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat di adakan pengawasan yang cukup untuk di penuhi syarat umum, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya di tetapkan.
5. Perintah tersebut dalam ayat (1) harus di sertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP menentukan :

- a) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- b) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah di beritahukan kepada terpidana menurut cara yang di tentukan dalam undang- undang.
- c) Masa percobaan tidak di hitung selama terpidana di tahan secara sah.

Pasal 14c KUHP menentukan :

- 1) Dengan perintah yang di maksud Pasal 14a, kecuali jika di jatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak

akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana tadi.

- 2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh di terapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- 3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP menentukan :

- a. Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat di penuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- b. Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

- c. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, di atur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP menentukan Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang di perintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat di terapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP menentukan :

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya di beri peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pembedaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak di penuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis di jatuhi pembedaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana

memberika peringatan itu.

2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana di jalankan tidak dapat di berikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang bahwa dalam pokoknya ialah orang (si terdakwa) dijatuhi hukuman, memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya di jalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Jadi yang dimaksud dalam Pasal 14a (1) KUHP di atas adalah tetapi hukuman itu tidak usah di jalankan, kecuali jika ternyata bahwa terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim dengan si terdakwa. Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak di lakukan.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memberikan kesempatan atau memperbaiki penjahat tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang iya tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.

Selanjutnya dalam Pasal 14b KUHP mengatur tentang lamanya waktu untuk masa percobaan, di mana terpidana harus menahan diri jangan sampai melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama satu tahun bagi penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan bersyarat adalah bahwa untuk perkara-perkara yang lebih berat yang untuk penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari satu tahun, dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang di pertimbangkan oleh hakim sebagai sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika di jatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun, dan tidak untuk pidana yang lebih dari satu tahun. Ketentuan batas maksimum satu tahun ini berlatar belakang bahwa dalam pidana bersyarat sudah tidak terdapat lagi rasa pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan.

### **Pengertian Pembinaan**

Menurut **Dra. CM. Marianti Soewandi, Bc. IP**, Pembinaan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis yang di tujukan pada individu/klien agar supaya dapat memecahkan masalahnya, mampu memahami diri sendiri (*selfunderstanding*), mampu mengarahkan dirinya (*self directing*) sesuai

dengan potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat<sup>10</sup>.

Pembinaan yang berakar dari bidang pendidikan yang berarti menunjukkan jalan, member petunjuk dan peringatan. Jadi Pembinaan kepada klien berarti memberikan bantuan kepada klien yang bersangkutan karena mengalami permasalahan untuk memberikan pemecahan, baik pemecahan sosial maupun hukum.

### **Pembinaan Klien Masyarakat**

Pembinaan klien masyarakat adalah suatu pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum, sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan akan tetapi sebagai salah satu pelaksanaan sistem pemasarakatan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasarakatan. Jadi dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaannya hampir sama tetapi hanya berbeda lokasinya saja.

Pembinaan Klien Pemasarakatan pada hakekatnya adalah pembinaan klien di luar Lembaga sebagai salah satu sistem perlakuan

---

<sup>10</sup>[https://www.google.co.id/search?q=peranan+balai+pemasarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+ter&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gws\\_rd=cr&ei=Z1HgU4WNJ8O48gW6mIKQBA#channel=sb&q=peranan+balai+pemasarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+tererpidana+bersyarat&rls=org.mozilla:en-US:official](https://www.google.co.id/search?q=peranan+balai+pemasarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+ter&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=Z1HgU4WNJ8O48gW6mIKQBA#channel=sb&q=peranan+balai+pemasarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+tererpidana+bersyarat&rls=org.mozilla:en-US:official).di akses tgl 28 mei 2013



terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk membimbing klien tidak lepas dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

Secara singkat Pembinaan Klien Masyarakat adalah daya upaya yang bertujuan untuk memperbaiki klien dengan maksud secara langsung dapat menghindarkan diri atas terjadinya pengulangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku. Bimbingan klien ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga tidak di dalam Lapas. Bimbingan yang diberikan harus dapat mendorong dan memantapkan hasrat Klien untuk sembuh dan memiliki kedudukan sosial serta dapat melaksanakan peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

### **Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kota Jayapura**

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi yang berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mengabaikan nilai- nilai hak asasi manusia sebagai salah satu tugas yang harus di jalankan. Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit

pelaksana teknis yang menangani pembimbingan terhadap klien pemasarakatan. Pembinaan yang di maksud adalah terhadap klien anak maupun klien dewasa. Dalam penelitian ini di khususkan pada pembinaan Klien dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syores Wangguway S.H.Yang saat penelitian dilakukan menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Jayapura, diperoleh informasi bahwa peran Balai Pemasarakatan dalam pembinaan terhadap terpidana bersyarat di lakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasarakatan Jayapura.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan terpidana bersyarat, agar si terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang sama<sup>11</sup>.

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas meberikan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien pemasarakatan di atur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Dalam melakukan pembinaan ada beberapa tahap yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) yaitu :

- a. Bimbingan tahap awal yang terdiri dari :
  1. Penelitian Kemasyarakatan yang di gunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang di peroleh dianalisis dan di simpulkan oleh

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Syores Wangguway S.H Kepala Subseksi Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Jayapura Pada tgl 22 mei 2013

pembimbing kemasyarakatan kemudian diberikan saran atau pertimbangan

2. Menyusun rencana program bimbingan
  3. Pelaksanaan program bimbingan
  4. Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- b. Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari:
1. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan Klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah serta pengkatan bimbingan terhadap Klien
  2. Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir
- c. Bimbingan tahap akhir yang terdiri dari :
1. Pelaksanaan program bimbingan
  2. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
  3. Mempersiapkan Klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*)
  4. Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan Klien
  5. Mengakhiri masa bimbingan Klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.

Adapun jenis materi bimbingan yang pernah atau sudah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap Klien di BAPAS Klas II

Jayapura adalah :

1. Kegiatan Keagamaan

Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan pengarahan tentang Ilmu-ilmu Agama, sesuai dengan agama klien. Dengan memberikan ilmu agama ini diharapkan klien mampu melaksanakannya dan takut untuk melakukan tindak pidana kembali

2. Pendidikan Budi Pekerti

Jika Pembimbing Kemasyarakatan menganggap klien kurang pendidikan budi pekerti maka PK akan memberitahukan perilaku-perilaku yang baik dan sopan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan penjelasan dari PK tersebut di harapkan klien jauh dari perbuatan yangtergolong tindak pidana

3. Bimbingan dan Penyuluhan Perorangan maupun Kelompok

Pembimbingan Kemasyarakatan dapat melakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Perorangan maksudnya, klien yang dibimbing, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) hanya satu orang. Secara berkelompok Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan mengumpulkan semua Klien yang di bimbingnya dan akan memberikan penyuluhan dan petunjuk-petunjuk secara umum kepada semua klien bimbingannya.

4. Pendidikan Keterampilan Kerja

Keterampilan yang di kembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing Klien, yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dari

Balai Latihan Kerja (BLK) Jayapura. Dengan adanya keahlian dalam bekerja di harapkan agar Klien dapat berfikir positif dan tidak lagi melakukan tindak pidana

#### 5. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Pembimbing Kemasyarakatan akan menganjurkan kepada klien untuk mencari pekerjaan dan rajin dalam berusaha. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari keluarganya (klien) dan hidup bahagia serta sejahtera. Dan mengingatkan kepada klien untuk tidak melakukan kejahatan kembali, karena jika dipidana lagi maka keluarganya akan sengsara/tidak sejahtera.

Mengingat tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak sekedar hanya membuat hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), namun lebih dari itu, seorang pembimbing kemasyarakatan harus bersikap profesional. Harus mampu melaksanakan seluruh perannya dalam melakukan pembinaan terhadap Klien anak maupun Klien Dewasa, membuat saran terbaik bagi klien yang hanya di tujukan untuk kepentingan terbaik bagi klien. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan di tuntut untuk dapat menggerakkan hati klien yang di tangannya sehingga timbul kesadaran diri klien tersebut dan dapat mengembalikan rasa percaya diri klien agar mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan peran-peran profesionalnya dari tahap awal

hingga tahap akhir pembimbing kemasyarakatan menjalankan beberapa peran profesional yang spesifik antara lain :

1. Sebagai *broker*, yaitu dapat membantu menyediakan pelayanan sosial kepada klien yang sangat membutuhkan solusi terbaik bagi diri terpidana bersyarat atau klien dewasa tersebut, karena setiap perbuatan yang dilakukannya terdapat latar belakang yang menjadi sebab dilakukannya
2. Sebagai mediator, di harapkan dapat menjadi penghubung antara klien dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat;
3. *Public educator*, yaitu dapat memberikan dan menyebarkan informasi mengenai masalah dan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia
4. *Advocate*, merupakan bentuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai hak-hak yang layak di perjuangkan oleh klien dalam memperoleh pelayanan sehingga lembaga yang melayaninya lebih responsif untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak klien
5. *Behaviour specialist*, yaitu seorang pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik perubahan perilaku melalui pola pikir sehingga tercipta suatu keyakinan pada diri klien
6. Konsultan, adalah memberikan nasihat dan saran kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan suatu permasalahan yang terjadi tanpa menimbulkan masalah baru

7. Konselor, yaitu memberikan pelayanan konseling kepada klien sesuai profesi pembimbing kemasyarakatan secara professional.

Agar dapat menjalankan peran-peran profesionalnya seperti yang telah di uraikan di atas maka setiap pembimbing kemasyarakatan bukanlah orang- orang sembarangan yang tidak tahu menahu tentang proses pemasarakatan. Syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban ,dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan<sup>12</sup>. yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
  - a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial
  - b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan Lainnya
2. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing bagi lulusan
  - a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial  
berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
  - b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a)
5. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan
6. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan

---

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998

sosial

7. Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman di sipilin.

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak terpidana bersyarat mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri oleh hakim.

Teknik Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Jayapura dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Memerintahkan terbimbing atau klien dewasa untuk datang ke Balai Pemasyarakatan guna diberikan pengertian, ketrampilan, dan saran-saran yang juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan
2. Diadakan kunjungan ke rumah klien, kunjungan ke rumah klien yang waktunya ditetapkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan sampai berakhirnya masa Putusan bersyaratnya, dan sekaligus juga menjadi sarana bimbingan bagi klien. Dengan kata lain para petugas (BAPAS) Jayapura yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) turun langsung kelapangan untuk mengunjungi klien di tempat tinggalnya. Dalam melakukan bimbingan, disini BAPAS Jayapura menggunakan teknik wawancara dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada para klien untuk melihat kemajuannya dan situasi keluarga serta lingkungannya
3. Surat menyurat. Dalam hal ini bentuk pembimbingan yang dilakukan di



karenakan jarak antara tempat tinggal antara klien dan kantor Balai Pemasarakatan Jayapura yang jauh, atau bisa karena tempat tinggal klien yang terpencil sehingga membuat sulit untuk di jangkau oleh transportasi atau kendaraan umum.

Sedangkan untuk bentuk bimbingan yang di berikan Balai Pemasarakatan Jayapura terhadap kliennya, yaitu:

1. Perkelompok

Dalam bentuk bimbingan ini para klien dibuat kelompok oleh Balai Pemasarakatan Jayapura berdasarkan tempat tinggal klien, hal tersebut agar lebih mudah dalam memberikan bimbingan.

2. Perorangan

Bentuk bimbingan ini diberikan secara perorangan oleh Balai Pemasarakatan Jayapura karena biasanya dalam ruang lingkup tempat tinggal klien

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa peranan balai pemsarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana bersyarat. Di lakukan melalui tiga tahap yaitu: bimbingan tahap awal yang terdiri dari. Penelitian Kemasyarakatan, Menyusun rencana program bimbingan, Penilaian pelaksanaan program

tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan, bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari. Pelaksanaan program bimbingan, Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. Bimbingan tahap akhir yang terdiri dari, Pelaksanaan program bimbingan, Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, Mempersiapkan Klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan Klien, Mengakhiri masa bimbingan Klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamsah, *Sistim pidana dan pembedaan indonesia*, PT.Prandnya paramita, Jakarta 1993.

[https://www.google.co.id/search?q=peranan+balai+pemasyarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+ter&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gws\\_rd=cr&ei=Z1HgU4WNJ8O48gW6mIKQBA#channel=sb&q=peranan+balai+pemasyarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+tererp+idana+bersyarat&rls=org.mozilla:en-US:official](https://www.google.co.id/search?q=peranan+balai+pemasyarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+ter&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=Z1HgU4WNJ8O48gW6mIKQBA#channel=sb&q=peranan+balai+pemasyarakatan+dalam+melakukan+pembinaan+terhadap+tererp+idana+bersyarat&rls=org.mozilla:en-US:official)

*Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998*

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*.

R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1991.

Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, 1985.

Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cv, Rajawali, 1983, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan